

Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat

Raudhatul Jannah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: rj246689@gmail.com

Aqwa Naser Daulay

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: aqwanaserdaulay@uinsu.ac.id

Abstract. *The aim of this research is to help report users make decisions and show accountability for the use of resources. The Budget Realization Report offers information about financial conditions. The aim of this research is to evaluate the financial performance of the Tanjung Pura District Office using data from the 2019–2021 budget realization report. In public sector organizations, budgeting can help achieve accountability. The budget realization report shows the difference between the budget and its realization for a reporting period by providing an overview of the source, distribution and use of financial resources supervised by the local government. Efficacy and efficiency ratios are used in qualitative descriptive techniques. Interviews and scientific presentation of data, especially reports on regional income and expenditure budget achievements, were used to collect data from field research. Research findings show that the PAD revenue performance of 94.09% in 2019, 99.04% in 2020, and 100.7% in 2021 is effective. Likewise, the expenditure budget shows efficiency with a percentage of 78.91% in 2019, 63.79% in 2020, and 58.9% in 2021, all of which are in line with the goals to be achieved. To increase effectiveness and efficiency in the future, it is hoped that the Tanjung Pura District Office can continue to operate optimally, optimize the use of the budget wisely, and further review the benefits and budget allocations.*

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, Performance*

Abstrak. Tujuan dalam penelitian ini untuk membantu pengguna laporan pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas penggunaan sumber daya, Laporan Realisasi Anggaran menawarkan informasi tentang kondisi keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kantor Kecamatan Tanjung Pura dengan menggunakan data laporan realisasi anggaran tahun 2019–2021. Dalam organisasi sektor publik, pembuatan anggaran dapat membantu mencapai akuntabilitas. Laporan realisasi anggaran menunjukkan perbedaan antara anggaran dan realisasinya untuk satu periode pelaporan dengan memberikan gambaran umum tentang sumber, distribusi, dan penggunaan sumber daya keuangan yang diawasi oleh pemerintah daerah. Rasio efikasi dan efisiensi digunakan dalam teknik deskriptif kualitatif. Wawancara dan pemaparan data secara ilmiah khususnya laporan pencapaian anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan untuk mengumpulkan data dari penelitian lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PAD yang sebesar 94,09% pada tahun 2019, 99,04% pada tahun 2020, dan 100,7% pada tahun 2021 sudah efektif. Begitu pula dengan anggaran belanja yang menunjukkan efisiensi dengan persentase sebesar 78,91% pada tahun 2019, 63,79% pada tahun 2020, dan 58,9% pada tahun 2021, semuanya telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ke depan, diharapkan Kantor Kecamatan Tanjung Pura dapat terus beroperasi secara maksimal, lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran secara bijaksana, dan mengkaji lebih lanjut manfaat dan alokasi anggaran.

Kata Kunci: Efektifitas, Efisiensi, Kinerja

PENDAHULUAN

Sistem akuntansi sektor publik adalah metode akuntansi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan di Indonesia beserta departemen-departemen di bawahnya. Tujuan dari sistem ini adalah menjadi salah satu alat pertanggungjawaban kepada masyarakat. Saat ini, sektor publik dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme, serta memperhatikan konsep "*value for money*". *Value for money* mengacu pada aspek ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, dengan penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (maksimal manfaat dengan biaya minimal), serta efektivitas dalam mencapai anggaran sesuai tujuan dan sasaran.

Pentingnya pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus perhatian bagi kinerja pemerintah Kantor Kecamatan Tanjung Pura. Dalam mengelola keuangan, pemerintah kantor kecamatan dituntut untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas.

Anggaran menjadi masalah rutin karena rendahnya daya serap anggaran, yang menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaannya. Beberapa aspek perlu dievaluasi, seperti lemahnya perencanaan program dan kegiatan, serta koordinasi yang kurang efektif antara unit perencana dan unit pelaksanaan kegiatan. Ketua DPR RI Marzuki Alie (2012) menyatakan bahwa kelemahan dalam penyerapan anggaran mengakibatkan revisi anggaran yang sering dilakukan.

Menurut nota keuangan dan RAPBN 2014, daya serap anggaran belanja kementerian dan lembaga hanya mencapai rata-rata 87% dari penggunaan anggaran yang ditetapkan APBN setiap tahun. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (BPKP) menyebutkan bahwa penyerapan dana yang tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Di Indonesia, rata-rata SILPA di Pemerintah Daerah setiap tahunnya melebihi Rp 50 Triliun. Besarnya SILPA tersebut bukan hanya disebabkan oleh efisiensi pengelolaan belanja daerah, tetapi juga menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif. Salah satu penyebabnya adalah program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan (2012).

Anggaran merupakan perencanaan keuangan untuk masa mendatang yang mencakup harapan manajemen terhadap pendapatan, biaya, dan transaksi keuangan lainnya dalam jangka waktu satu tahun. Dalam konteks organisasi sektor publik, anggaran mencakup rencana biaya yang terkait dengan program yang telah disusun, serta strategi untuk memperoleh dana yang diperlukan

untuk mendanai rencana tersebut. Tahap penyusunan anggaran dianggap sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menghambat pencapaian program yang telah direncanakan sebelumnya.

Seringkali, dalam praktiknya, penyusunan anggaran dianggap sebagai proses terpisah dari perumusan dan perencanaan strategis, sehingga keberhasilan penerapan anggaran tidak selalu sejalan dengan keberhasilan pencapaian program dan tujuan organisasi. Pendekatan penganggaran seperti ini dapat menghasilkan anggaran yang tidak efektif sebagai alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi, anggaran memiliki peran kunci sebagai rencana keuangan yang disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan.

Dengan adanya tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas publik, setiap organisasi pemerintah diharapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada penciptaan tata kelola yang baik (*good governance*) dan masyarakat yang baik (*good public*), sesuai dengan konsep yang diungkapkan oleh Tamasoleng (dalam Untari, 2015:2).

Mewujudkan *Good Governance* memerlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar, terutama dari sistem lama yang bersifat sentralistis di mana pemerintah pusat memiliki kendali yang kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru ini menuntut adanya suatu sistem yang dapat mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Selain itu, sistem baru ini harus mampu memberdayakan daerah agar dapat bersaing secara baik baik secara regional, nasional, maupun internasional.

Sebagai respons terhadap paradigma baru ini, pemerintah memberikan otonomi kepada daerah sebanyak mungkin. Otonomi ini bertujuan untuk memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dapat menjadi berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, pemberian otonomi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan semangat desentralisasi yang mendukung prinsip *Good Governance*, di mana kebijakan dan pengelolaan pemerintahan lebih mendekati kebutuhan dan realitas di tingkat lokal. (Dien dkk, 2015:535)

Pengelolaan anggaran melibatkan evaluasi terhadap dana yang telah dianggarkan dan digunakan untuk kegiatan operasional. Realisasi anggaran merujuk pada pendapatan yang telah disetujui melalui anggaran pemerintah selama satu tahun dan digunakan untuk membayar utang

serta belanja dalam periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menjadi instrumen penting dalam menggambarkan keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu kegiatan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan atau ringkasan lainnya. LRA berperan dalam membantu para pemakai informasi keuangan untuk membuat keputusan.

Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memperjelas bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pengelola bendahara umum negara/daerah. Pemerintah daerah diharapkan menyelenggarakan akuntansi dalam suatu sistem dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri keuangan (untuk lingkungan pemerintah pusat) dan oleh menteri dalam negeri (untuk lingkungan pemerintah daerah).

Dalam rangka memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pembendaharaan, setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Menteri/pemimpin lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja perangkat daerah harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan informasi yang terkandung dalam laporan keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Latar belakang tersebut menjelaskan bahwa Kecamatan Tanjung Pura, sebagai sub-wilayah pembangunan I di Kabupaten Langkat, memiliki tanggung jawab sebagai penyelenggara keuangan daerah dan pelaksana kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan ini memiliki tugas dalam menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, serta mengkoordinasikan pembinaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Laporan realisasi anggaran dianggap sebagai alat ukur untuk menilai kinerja keuangan. Dalam konteks Kecamatan Tanjung Pura, serapan anggaran yang rendah dan belum optimal diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya meningkatkan penerimaan daerah dengan memberikan perhatian khusus pada perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tidak tercapainya kemandirian daerah disebabkan oleh ketergantungan pada dana transfer yang besar.

Pentingnya efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi fokus, dengan menekankan bahwa anggaran belanja publik sebaiknya lebih besar digunakan untuk program-program yang memberikan dampak langsung pada masyarakat daripada belanja aparatur daerah. Oleh karena itu, penilaian kinerja keuangan Kecamatan Tanjung Pura dilakukan melalui analisis laporan realisasi anggaran (LRA), yang mencerminkan pertumbuhan pendapatan dan belanja setiap tahunnya.

Dari latar belakang tersebut, penelitian diajukan dengan judul "ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR KECAMATAN TANJUNG PURA." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengelolaan anggaran dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Pura dan sejauh mana kinerja keuangannya mencapai target yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang diambil dari catatan yang sudah ada yang dikelola oleh pihak ketiga untuk melihat perkembangan objek penelitian dengan periode tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Mengolah data dengan menghitung presentase tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN HASIL

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan kecamatan Tanjung Pura dalam merealisasikan anggaran penerimaan PAD yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil kecamatan Tanjung Pura. Kemampuan kecamatan Tanjung Pura dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Dengan demikian, semakin tinggi efektivitas, maka kemampuan kinerja kecamatan Tanjung Pura semakin baik. Berikut ini merupakan data Laporan Realisasi Anggaran penerimaan PAD tahun 2019-2021 pada Kantor Kecamatan Tanjung Pura dapat dilihat pada tabel 1 serta dapat dihitung menggunakan rasio efektivitas pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 1. Target Penerimaan PAD dan Realisasi Anggaran

| Tahun | Target Anggaran (Rupiah) | Realisasi (Rupiah) |
|-------|--------------------------|--------------------|
| 2019 | 3.283.800.000 | 3.089.981.809 |
| 2020 | 4.107.500.000 | 4.068.291.819 |
| 2021 | 4.702.750.843 | 4.735.664.267 |

Hasil tabel 1 target penerimaan PAD Tahun 2019 sebesar Rp. 3.283.800.000 dan realisasinya lebih rendah dari target penerimaan yaitu sebesar Rp. 3.089.981.809. Tahun 2020 target penerimaan PAD sebesar Rp. 4.107.500.000 dan realisasinya lebih rendah dari target penerimaan yaitu sebesar Rp. 4.068.291.819 dan pada tahun 2021 Penerimaan PAD sebesar Rp. 4.702.750.843 dan realisasinya lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 4.735.664.267.

Tabel 2. Rasio Efektivitas Penerimaan PAD

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100 \% \\ \text{Tahun 2019} &= \frac{3.089.981.809}{3.283.800.000} \times 100 \% \\ &= 94,09 \% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{4.068.291.819}{4.107.500.000} \times 100 \% \\ &= 99,04 \% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{3.089.981.809}{4.702.750.843} \times 100 \% \\ &= 100,7 \% \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas penerimaan PAD tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3. Rasio Efektifitas Penerimaan PAD Kecamatan Tanjung Pura

| Tahun | Target Anggaran | Realisas | Rasio(%) |
|-------|-----------------|---------------|----------|
| 2019 | 3.283.800.000 | 3.089.981.809 | 94,09 |
| 2020 | 4.107.500.000 | 4.068.291.819 | 99,04 |
| 2021 | 4.702.750.843 | 4.735.664.267 | 100,7 |

Tabel 4. Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efektivitas

| <u>Kriteria</u> | <u>Keterangan</u> |
|-----------------|-------------------|
| $\geq 100\%$ | Sangat Efektif |
| 90% - 100 % | Efektif |
| 80% - 90% | Cukup Efektif |
| 60% - 80% | Kurang Efektif |
| $\leq 60\%$ | Tidak |

Efektif Sumber: Dien, dkk (2015)

Standar pengukuran kriteria rasio efisiensi merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien suatu entitas atau proses dalam menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Rasio efisiensi mengacu pada perbandingan antara output yang dihasilkan dengan input yang digunakan dalam suatu sistem atau proses.

Dapat dilihat dari tabel 2.3 dan 2.4, maka laporan realisasi anggaran penerimaan PAD kecamatan Tanjung Pura Tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa nilai presentase laporan realisasi anggaran penerimaan PAD sebesar 97,94% sehingga sudah efektif dikarenakan :

a. Tahun 2019

Berdasarkan hasil Rasio Efektivitas penerimaan PAD kantor Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2019 pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa rasio efektivitas sebesar 94,09 % hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja pada Kecamatan Tanjung Pura efektif, karena kriteria efektivitas penerimaan PAD diantara 90% - 100 % sehingga dikatakan efektif.

b. Tahun 2021

Berdasarkan hasil Rasio Efektivitas penerimaan PAD kantor Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2019 pada tabel 2.3 presentase Rasio Efektivitas mengalami kenaikan, dapat diketahui bahwa rasio efektivitas sebesar 100,7% hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja pada Kecamatan Tanjung Pura sangat efektif, karena kriteria efektivitas penerimaan PAD $\geq 100\%$ sehingga dikatakan sangat efektif.

Rasio Efisiensi Anggaran Belanja

Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan kecamatan Tanjung Pura dalam merealisasikan anggaran belanja yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil kecamatan Tanjung Pura. Kemampuan kecamatan Tanjung Pura dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal sebesar kurang atau samadengan 60%. Dengan demikian, semakin rendah efisien, maka kemampuan kinerja kecamatan Tanjung Pura semakin baik.

a. Tahun 2020

Hasil tabel 4 target Anggaran Belanja tahun 2019 sebesar Rp. 6.015.470.529 dan realisasinya lebih rendah dari realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 4.747.376.813. Tahun 2017 target Anggaran Belanja sebesar Rp. 6.015.470.529 dan realisasinya lebih rendah dari target realisasi belanja yaitu sebesar Rp. 3.837.626.566 dan pada tahun 2018 Anggaran Belanja sebesar Rp. 7.811.221.372 dan realisasinya lebih tinggi yaitu sebesar Rp. 4.597.621.219.

Tabel 5. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja

$$\text{Rasio Esensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100 \%$$

Sumber : Dien,dkk (2015)

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{4.747.376.813}{6.015.470.529} \times 100 \% \\ &= 78,91 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{3.837.626.566}{6.015.470.529} \times 100 \% \\ &= 63,79\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2021} &= \frac{4.597.621.219}{7.811.221.372} \times 100 \% \\ &= 58,9\% \end{aligned}$$

Menurut perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 6 dibawah ini:

Tabel 6. Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Kecamatan Tanjung Pura

| Tahun | Target Anggaran Belanja (Rupiah) | Realisasi (rupiah) | Rasio (%) |
|-------|-------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 2019 | 6.015.470.529 | 4.747.376.813 | 78,91 |
| 2020 | 6.015.470.529 | 3.837.626.566 | 63,79 |
| 2021 | 7.811.221.372 | 4.597.621.219 | 58,9 |

Sumber: data diolah (2019)

Tabel 7. Standar Pengukuran Kriteria Rasio Efisiensi

| <u>Kriteria</u> | <u>Keterangan</u> |
|-----------------|-------------------|
| > 100% | Tidak Efisiensi |
| 90%- 100% | Kurang Efisien |
| 80%-90% | Cukup Efisien |
| 60%-80% | Efisien |
| < 60% | Sangat Efisien |

Dapat dilihat dari tabel 6 dan 7, maka laporan realisasi anggaran belanja kecamatan Tanjung Pura Tahun 2019-2021 dapat disimpulkan bahwa nilai presentase laporan realisasi anggaran belanja sebesar 67,18 % sehingga sudah efisien dikarenakan :

b. Tahun 2019

Berdasarkan hasil Rasio Efisien Anggaran Belanja kantor Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2019 pada tabel 6 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi sebesar 78,91 % hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja pada Kecamatan Tanjung Pura efisien, karena kriteria efisiensi anggaran belanja diantara 60% - 80% sehingga dikatakan efisien.

c. Tahun 2020

Berdasarkan hasil Rasio Efisien Anggaran Belanja kantor Kecamatan Tanjung pura Tahun 2019 pada tabel 6 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi sebesar 63,79 % hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja pada Kecamatan Tanjung Pura efisien, karena kriteria efisiensi anggaran belanja diantara 60% - 80% sehingga dikatakan efisien.

d. Tahun 2021

Berdasarkan hasil Rasio Anggaran Belanja kantor Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2019 pada tabel 6 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi sebesar 58,9 % mengalami penurunan sedikit dari tahun sebelumnya. Hal ini mengidentifikasi bahwa kinerja pada Kecamatan Tanjung Pura sangat efisien karena kriteria efisiensi anggaran belanja diantara $\leq 60\%$ sehingga dikatakan sangat efisien.

PEMBAHASAN

Hasil analisis efektivitas penerimaan PAD dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dengan presentase tahun 2016 sebesar 94,09%, tahun 2017 sebesar 99,04% serta tahun 2018 sebesar 100,7 % yang berasal dari hasil penerimaan pajak daerah dan hasil transfer dari APBN yang besar dibandingkan dengan target yang terealisasi sehingga kemampuan satuan kerja efektif. Kecamatan Tanjung Pura mengupayakan meningkatkan pendapatan daerah menggunakan strategi dan inovasi yang dapat diterima dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ikut serta membangun daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi yang sudah ada dasar peraturannya. Realisasi anggaran dikatakan baik jika semakin tinggi tingkat rasio efektifitasnya.

Hasil analisis efisiensi anggaran belanja dari tahun ke tahun mengalami penurunan yaitu dengan presentase tahun 2019 sebesar 78,91%, tahun 2020 sebesar 63,79% serta tahun 2021 sebesar 58,9 %. Hal ini disebabkan belanja barang dan jasa diminimalkan karena kecamatan Tanjung Pura tidak memproduksi barang yang dijual tetapi menyediakan jasa untuk kepentingan masyarakat dan belanja modal peralatan dan mesin diminimalkan dengan tidak membeli peralatan dan mesin yang masih bisa digunakan. Hal tersebut menunjukkan penggunaan kinerja keuangan dengan sebaik mungkin dan karena adanya penghematan penggunaan anggaran belanja Kecamatan Tanjung Pura setiap tahunnya melakukan pemangkasan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan berbeda-beda. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan semakin baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Laporan Realisasi Penerimaan PAD dan Anggaran Belanja pada Kecamatan Tanjung Pura, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Rasio Efektivitas Penerimaan PAD Kecamatan Tanjung Pura

Tingkat dan kriteria Efektivitas penerimaan PAD pada Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2016-2018 sudah efektif menunjukkan kinerja yang baik, karena memiliki rata-rata presentase sebesar 97,94 % dari rata-rata jumlah rasio tahun 2019 sebesar 94,09% ditambah tahun 2020 sebesar 99,04% dan ditambah tahun 2021 sebesar 100,70%. Hal ini disebabkan Kecamatan Tanjung Pura dapat mengelola dan mempertimbangkan anggarannya dengan baik.

Rasio Efisien Anggaran Belanja Kec. Tanjung Pura

Tingkat dan kriteria efisiensi anggaran belanja pada kec. Tanjung Pura tahun 2019-2021 sudah efisien menunjukkan kinerja yang baik, karena memiliki rata-rata presentase 67,18% dari rata-rata jumlah rasio tahun 2019 sebesar 78,91 % ditambah tahun 2020 sebesar 63,79% dan ditambah tahun 2021 sebesar 58,90%. Hal ini disebabkan kec. Tanjung Pura menggunakan anggaran Belanja yang dibutuhkan dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, R., Arief, K., & Ishak, J. F. (2021). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(1), 52-62.
- Chartady, R., Meifari, V., Wulandari, T., & Utami, R. (2022). Analisis kinerja belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA). *Media Bina Ilmiah*, 17(1), 93-100.
- Fitra, H. (2019). *Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah*. Irdh.
- Fitra, H., & ilmi Efendi, Z. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. *Menara Ilmu*, 14(1).
- Hapsari, M., Winarsih, E., & Prabawa, S. T. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pada Pemda Kota Surakarta Di Era Pandemi Covid-19. *JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA*, 6(2), 1110-1121.
- Meiliya Dona, E., & Lestari, V. A. (2020). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Oku. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 135-144.
- Rahayu, R. P. (2017). Analisis atas laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah kabupaten pamekasan. *Makro: Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1(1), 55-73.

- Sabrina, D. (2018). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Laporan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 571-585.
- Syaifanur, F., & Saleh, M. (2022). Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Tingkat Ekonomi, Efektivitas, dan Efisiensi Kinerja Keuangan BLUD. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 252-258.